

PERSPEKTIF KEBIJAKAN BERBASIS BUKTI TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OPEN DEFECATION FREE (ODF) DI DESA MERI KABUPATEN PURBALINGGA

Ranjani^{1*}, Andri Trianfano², Alfriansa Agustina³, Doni Agustia Permana⁴, Inti Novita Sari⁵

^{1,2,3,4,5}Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP Universitas Wijayakusuma

* Corresponding author: ranjani@unwiku.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received: August 17, 2023

Revised: September 27, 2023

Accepted: October 16, 2023

Keywords:

Babs; Open Defecation Free;
Policy Implementation.

ABSTRACT

ODF (Open Defecation Free) or Stop Open Defecation is a condition when every individual in the community does not defecate openly. Open defecation (BABS) behavior is still common in Meri Village. Thus, this research will examine in more depth the government's efforts to achieve ODF in Meri Village. This study uses a qualitative approach to the implementation of the first pillar in evidence-based policy theory (Evidence Best Policy) in Meri Village. The research design used is a descriptive research design with a case study approach. The results of the study show that various efforts have been made by the government in realizing the achievement of Open Defecation Free (ODF) in Meri Village, Purbalingga Regency. So that in terms of compliance from the side of the village government as the program implementer it can be said to have complied, but on the community side as the program target has not fully complied. This is because in practice, the implementation of the ODF program in Meri Village still faces various obstacles, such as the large number of people who still defecate openly, and the conversion of the function of the river as an estuary for sewage disposal from residents' latrines because many residents do not yet have a septic tank.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi suatu negara salah satunya dipengaruhi oleh kualitas kesehatan yang dimiliki oleh negara tersebut. Kesehatan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui beberapa cara, seperti perbaikan kesehatan seseorang akan menyebabkan

pertambahan dalam partisipasi tenaga kerja. Perbaikan kesehatan dapat pula membawa perbaikan dalam tingkat pendidikan yang kemudian menyumbang terhadap pertumbuhan ekonomi, ataupun perbaikan kesehatan menyebabkan bertambahnya penduduk

yang akan membawa tingkat partisipasi angkatan kerja (Kurniasih, 2009). Hal tersebut sesuai dengan misi pembangunan kesehatan pada tahun 2015, yaitu memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau (Kemenkes, 2018).

Pembangunan di bidang kesehatan perlu dilaksanakan dan terus ditingkatkan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional karena pada dasarnya pembangunan nasional di bidang kesehatan erat dengan peningkatan mutu sumber daya manusia yang merupakan modal dasar untuk melaksanakan pembangunan (Pudjaningrum et al., 2016). Dasar-dasar pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah nilai kebenaran atau aturan pokok sebagai landasan untuk berfikir atau bertindak dalam pembangunan kesehatan. Dasar-dasar ini merupakan landasan dalam penyusunan visi dan misi dalam pembangunan kesehatan secara nasional (Riskesdas, 2018).

Salah satu upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat adalah dengan adanya fasilitas kesehatan lingkungan yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain tersedianya jamban keluarga (Pannyiwi et al, 2019). Di Indonesia sejak tahun 2018 sudah dicanangkan satu pendekatan untuk

mempercepat peningkatan akses sanitasi yang disebut Sanitasi Total Berbasis Masyarakat atau yang biasa disebut STBM. Pencanaan ini ditandai dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 852 pada September 2018 (Kemenkes, 2018).

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat memiliki 5 pilar, yaitu Stop Buang air besar di sembarang tempat, cuci tangan pakai sabun, Pengolahan air minum dan Makanan Rumah Tangga, Pengamanan Sampah Rumah Tangga dan Pengamanan Limbah Rumah Tangga. Dari ke lima pilar tersebut pilar ke satu, yaitu stop BABS merupakan awal permulaan dijalankannya program STBM di mana masyarakat desa/kelurahan dipicu untuk tidak melakukan BABS, khususnya perilaku buang air besar sembarangan yang berhubungan langsung dengan kualitas kesehatan masyarakat dan jika hal itu tidak diatasi, akan memberikan dampak buruk bagi masyarakat. Berdasarkan fakta empiris tersebut, pemerintah telah menyusun berbagai program sebagai solusi dari permasalahan tersebut (Asna, 2018).

Secara global, diperkirakan 892 juta orang masih berlatih defekasi terbuka (UNICEF, 2017) Sanitasi yang buruk menyebabkan berbagai penyakit menular seperti diare, helminth yang

ditularkan oleh tanah, schistosomiasis, dan infeksi trachoma (Boisson., et al. 2016). Peningkatan bukti menunjukkan bahwa sanitasi yang buruk juga terkait dengan *stunting* dan enteropati lingkungan, yang mengakibatkan peningkatan risiko penyakit menular, perkembangan kognitif yang lebih buruk, hasil pendidikan yang lebih rendah di sekolah, dan produktivitas lebih rendah dalam kehidupan dewasa (Mbuya, 2016). Mengingat pentingnya sanitasi untuk hasil kesehatan dan gizi, Tujuan Pengembangan Berkelanjutan (SDGs) menyerukan untuk mengakhiri defekasi terbuka dan mencapai akses universal ke sanitasi dan juga menekankan keadilan, martabat, gender, dan keberlanjutan (UNICEF, 2017).

Di beberapa negara berkembang (85%) pencemaran berasal dari polusi air limbah rumah tangga di negara-negara miskin, sementara hanya 15% dari semua limbah datang dari negara kaya (Suriawiria, 1996). Di Indonesia, Buang Air Besar Sembarangan (BABS) adalah hal umum (Ardi, 2022). Mukherjee, 2011 menyatakan bahwa perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau *Open Defecation* termasuk salah satu perilaku yang tidak sehat.

Kurangnya perhatian umum terhadap kebersihan dan kesehatan adalah salah satu alasan mengapa orang

terus terlibat dalam Buang Air Besar Sembarangan (BABS) (Benga et al., 2022). Salah satu jenis dampak yang disebabkan oleh dampak Buang Air Besar Sembarangan (BABS) adalah penyakit cacangan (Nainggolan, 2022). Sifat kasar dan kotor air sungai, gaya hidup kebanyakan orang tidak menempatkan begitu banyak penekanan pada kebersihan air minum (Made, 2019).

Menurut data dari Survei Ekonomi Sosial Nasional (SUSENAS) Badan Statistik Pusat (BPS) pada tahun 2020, 35,8 juta orang di Indonesia melepaskan air limbah besar (BABS) langsung ke dalam sungai tanpa perawatan sebelumnya sehingga menginfeksi sekitar 45% sungai negara (BPS,2020). Purbalingga adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang sampai saat ini belum memiliki akses ke sanitasi yang efektif. Di Kabupaten Purbalingga pelaksanaan program sanitasinya saat ini baru mencapai 76,33% sehingga berdasarkan kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Purbalingga menyusun dan mengimplementasikan peraturan daerah yang berisi larangan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) (BPS, 2020). Desa Meri merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Purbalingga yang masyarakatnya terindikasi masih melakukan perilaku Buang Air Besar

Sembarangan dengan jumlah masih cukup banyak.

Berdasarkan berbagai uraian fakta empiris tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti secara lebih mendalam mengenai “Bagaimana Perspektif Kebijakan Berbasis Bukti Terhadap Implementasi Kebijakan *Open Defecation Free (ODF)* Di Desa Meri Kabupaten Purbalingga?”. Penelitian ini penting untuk dilakukan, terlebih jika dikaitkan dengan tujuan *SDGs* yang ke-enam di mana Sanitasi, begitu juga air bersih, secara khusus dibahas pada tujuan enam *SDGs*. Salah satu poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals/SDGs*) pada sektor lingkungan hidup adalah memastikan masyarakat mencapai akses universal air bersih dan sanitasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Meri Kabupaten Purbalingga. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada argumen : (1) Desa Meri merupakan salah satu desa yang masyarakatnya masih melakukan perilaku Buang Air Besar Sembarangan cukup tinggi; (2) Minimnya kepekaan masyarakat dalam kebersihan lingkungan sekitar yang membahayakan kesehatan warga di lingkungan Desa Meri. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Data dalam

penelitian ini diperoleh melalui informan kunci (*keyperson*) yang ditentukan secara bertujuan (*purposive*). Analisis data dilakukan melalui model analisis interaktif dari Miles, Huberman dan Saldana (2014: 13). Kemudian, validitas data dilakukan melalui triangulasi sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Stop Buang Air Besar Sembarangan merupakan salah satu dari kelima program yang ada dalam Kebijakan tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Program ke-6 tersebut adalah stop buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga, pengamanan sampah rumah tangga dan pengamanan limbah cair rumah tangga. STBM merupakan kebijakan pemerintah Indonesia dalam rangka mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Kebijakan sanitasi total berbasis masyarakat ini dimuat dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

Desa Meri Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu desa di

Kabupaten Purbalingga yang melaksanakan Program Stop Buang Air Besar Sembarangan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa perilaku BABs masih banyak dijumpai di Desa Meri.

Studi implementasi kebijakan yang dikaji dalam penelitian ini membahas pembuatan kebijakan pemerintah atas masalah kompleks di bidang kesehatan masyarakat (Hodgson et al., 2019), yaitu berkaitan dengan program *ODF*. Dalam penelitian ini digunakan dua pendekatan implementasi kebijakan publik menurut Ripley dan Franklin, yaitu *Compliance* dan *Whats Happening*. Berikut merupakan uraian hasil penelitian dan pembahasan pada masing-masing aspeknya:

Compliance

Desa Meri memulai program *ODF* pada tahun 2018, berkomitmen untuk mencapai status *ODF*. Pemerintah desa bekerja sama dengan masyarakat setempat, instansi pemerintah terkait dan lembaga swadaya masyarakat untuk beberapa tantangan. Salah satu kesulitan awal adalah kurangnya sumber air bersih dan tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi dan bahaya buang air besar sembarangan, tetapi dengan adanya program PAMSIMAS menjadi titik balik Desa Meri untuk menghadapi tantangan tersebut.

Hasil penelitian tersebut selaras dengan temuan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan konteks dan mampu menyelesaikan suatu masalah yang kompleks dan dinamis (Song et al, 2022). Namun demikian, temuan lainnya menunjukkan bahwa beberapa warga tidak sepenuhnya menyadari dampak kesehatan dan lingkungan dari praktik ini. Hal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya warga yang belum memiliki *septic tank* sehingga saluran pembuangannya langsung ke sungai. Berikut merupakan bukti dokumentasi dari fakta tersebut:

Gambar 1. Dokumentasi Aliran Pembuangan di Desa Meri



Sumber: data primer, 2023.

Berdasarkan permasalahan tersebut, pendekatan pendidikan sanitasi kemudian dilaksanakan secara intensif melalui kampanye, pertemuan masyarakat dan pelatihan. Selain itu, terdapat kendala terkait sumber daya dan infrastruktur Desa Meri yang terbatas dalam membangun fasilitas sanitasi. Beberapa rumah tidak memiliki air bersih, sanitasi yang layak atau uang untuk membangun jamban yang layak. Pemerintah desa dan mitra program berusaha memecahkan masalah dengan mengalokasikan anggaran dan sumber daya yang ada secara efektif dan mencari bantuan dari lembaga lain.

Gambar 2. Sertifikat *ODF* Desa Meri



Sumber: data primer, 2023.

Berikut merupakan sertifikat *ODF* dari Desa Meri. Temuan lain di lapangan menunjukkan bahwa Desa Meri mengalami perkembangan positif dalam mencapai status *ODF*. Hal tersebut dibuktikan dengan didapatkannya sertifikat *ODF* oleh Desa Meri.

Kemudian, ditemukan juga bahwa di Desa Meri, pembangunan unit sanitasi masih berlanjut. Melalui dukungan dari pemerintah desa dan organisasi pemerintah dan non-pemerintah, dimungkinkan untuk membangun jamban yang layak dan drainase yang memadai di banyak rumah. Selain itu, pembangunan jaringan air bersih juga meningkatkan akses air bersih.

Meskipun ada kemajuan yang signifikan, program *ODF* di Desa Meri masih kontroversial. Salah satunya adalah Desa Meri sudah mendapat sertifikat menjadi Desa *ODF*, tetapi pada realita di lapangan masih banyak dijumpai warga yang membuang air besar secara sembarangan. Oleh karena itu, pendekatan berkelanjutan seperti pemantauan rutin, pengawasan perlu dilakukan untuk memastikan bahwa perubahan perilaku yang dicapai dapat dipertahankan.

Dalam proses pelaksanaan program Desa Meri *ODF*, partisipasi aktif masyarakat sangat penting. Komunikasi dan keterlibatan langsung masyarakat pada setiap tahapan program menjadi kunci keberhasilan. Pemerintah desa, mitra program dan kelompok masyarakat setempat bekerja sama untuk mengatasi hambatan, memecahkan masalah dan mencapai tujuan bersama. Secara keseluruhan,

perkembangan program *ODF* di Desa Meri Purbalingga mencerminkan upaya berkelanjutan untuk mencapai status *ODF*. Ada tantangan dalam perjalanan ini, seperti kesadaran masyarakat dan sumber daya yang terbatas. Namun, dengan kerja sama dan komitmen semua pihak, Desa Meri telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam mencapai tujuan *ODF* dan meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada aspek kepatuhan atau *compliance* sudah dilakukan dengan baik oleh Pemerintah Desa Meri, namun masih terdapat beberapa pelanggaran dari sisi masyarakatnya. Hasil temuan tersebut selaras dengan hasil penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa dalam menetapkan bukti pada suatu kebijakan di bidang lingkungan kerap menuai berbagai tantangan dan kendala, misalnya keragaman jenis bukti, kendala etis dan praktis yang terlibat, ketidakpastian dan keandalan bukti, interaksi lingkungan dalam bidang kebijakan, serta kenyataan bahwa metode penyelesaian masalah seringkali membutuhkan upaya global yang terpusat dari pembuat kebijakan (Cairney, 2016; Cairney dan Oliver, 2017; Reed dan Meagher, 2019).

Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi

Pelaksanaan program stop buang air besar di level pemerintahan desa diselenggarakan oleh hampir semua jajaran pemerintahan desa, seperti kepala desa, perangkat desa, kader posyandu, bidan desa, dan kelompok kerja program Stop Buang Air Besar Sembarangan yang telah dibentuk melalui Surat Keputusan Kepala Desa demi tercapainya tujuan program, yaitu 100% masyarakat tidak buang air besar sembarangan. Temuan tersebut selaras dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nas"anen" dan Vanharanta (2016), bahwa dalam implementasi kebijakan dibutuhkan kerjasama antar seluruh aktor yang terlibat. Selain itu, implementor juga harus memperhatikan detail keterlibatan pihak lain, misalnya berkaitan dengan pembatasan program dan pengambilan keputusan (Van Marrewijk dan Van Den Ende, 2022).

Dalam pelaksanaannya, implementasi program *ODF* di desa Meri sudah 70% dilaksanakan dengan baik. Para warga yang kurang mampu sudah diberi bantuan, yaitu dengan cara membangun jamban di dalam rumah, serta pembangunan kolam ikan. Ketercapaian tersebut juga merupakan bukti atas implementasi kebijakan *ODF* di Desa Meri. Hasil temuan tersebut

selaras dengan hasil penelitian terdahulu bahwa bukti dalam implementasi kebijakan dapat digunakan secara simbolis untuk meningkatkan reputasi organisasi, meskipun ini berarti mengabaikan konteks pengambilan keputusan (Schrefler, 2014). Namun demikian, suatu bukti dalam implementasi kebijakan juga bisa diabaikan atau disalahartikan apabila terdapat konflik atas nilai dan ideologi politik atau karena kendala administratif (Strassheim dan Kettunen, 2014).

Partisipasi seluruh unit pemerintahan berperan penting dalam implementasi kebijakan *ODF* (*Open Defecation-Free*) di Purbalingga Desa Meri. Keterlibatan ini mencakup entitas pemerintah seperti pemerintah desa, dinas kesehatan, dinas lingkungan, dinas pembangunan dan banyak entitas lain yang terlibat. Pemerintah desa terlibat aktif dalam implementasi dan koordinasi kebijakan *ODF*. Mereka membentuk tim pelaksana *ODF* yang terdiri dari perangkat desa dan komite masyarakat setempat. Tim ini bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana aksi *ODF*, mengalokasikan sumber daya dan memenuhi jadwal pelaksanaan program. Pemerintah desa juga berperan dalam pertemuan dan sosialisasi untuk meningkatkan

kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi yang baik dan praktik buang air besar yang higienis.

Dinas Kesehatan berperan penting dalam implementasi kebijakan *ODF* dengan memberikan dukungan teknis dan informasi terkait aspek sanitasi dan kesehatan. Sinergi dan kerja sama antar unit pemerintah ini memungkinkan kerangka kerja yang komprehensif dan efisien untuk mencapai status *ODF*. Partisipasi aktif mereka memastikan pelaksanaan kegiatan yang diperlukan, alokasi sumber daya yang tepat dan pemantauan terus menerus untuk memastikan keberhasilan program *ODF* di Purbalingga Desa Meri. Selain itu, dalam melakukan penilaian kebijakan berbasis bukti juga penting untuk tidak merubah skema modal, deskriptif dan preskriptifnya (Grüne-Yanoff, 2016).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program STBM pilar Stop BABS di Desa Meri belum 100% *ODF*. Implementasi kebijakan *ODF* di Desa Meri dilakukan dengan pendekatan *Top Down*, yaitu sesuai dengan arahan dan instruksi dari Pemerintah Pusat. Kemudian, jika dikaitkan dengan teori Implementasi Kebijakan Ripley & Franklin, implementasi kebijakan Open

Defecation Free paada Desa Meri sebagai berikut :

1. Tingkat kepatuhan Pemerintah Desa Meri terhadap birokrasi di atasnya dapat dikatakan sudah patuh terhadap ketentuan kebijakan yang mengatur *ODF*.
2. Pelaksanaan program sudah terarah, meskipun masih terdapat beberapa kendala di dalamnya. Program yang diberikan oleh pemerintah ialah pembangunan jamban di dalam rumah warga. Di mana hanya 70% rumah warga yang memiliki jamban dan 30% masih dalam proses tahap pengajuan.

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian di atas, peneliti memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Meri Kabupaten Purbalingga perlu mengoptimalkan langkah-langkah pencapaian tujuan program stop buang air besar sembarangan seperti langkah pemecuan, pendampingan, monitoring dan evaluasi tanpa perlu menunggu adanya ketersediaan dana.
2. Diperlukan suatu produk hukum yang harus dibuat oleh pemerintah Desa Meri berupa Sanksi bagi masyarakat desa yang melakukan aktivitas buang air besar sembarangan di wilayah Desa Meri.

Sanksi tersebut berguna untuk memberikan efek jera kepada masyarakat sasaran.

3. Pemerintah Desa Meri perlu membangun jamban komunal.

DAFTAR PUSTAKA

- Aina, R.A.F, Ibrohim dan Suarsin, E. 2013. Hubungan Antara Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) Dengan Timbulnya Penyakit Skabies di Wilayah Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan. Naskah Publikasi
- Asna, F., Kadir, I., & Ilyas, G. B. (2018). Pengaruh Pengetahuan, Prilaku, Dan Partisipasi Terhadap Program Stop Buang Air Besar Sembarangan (Babs) Di Desa Bojo Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru. *Yume: Journal of Management*, 1(3).
- Astriani, E. (2019). Pelaksanaan *ODF* (*Open Defecation Free*) Di Desa Besuki Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek. *Publiciana*, 12(1), 23-39.
- Banerjee, S., Chattopadhyaya, M. C., & Chandra Sharma, Y. (2015). Removal of an azo dye (Orange G) from aqueous solution using modified sawdust. *Journal of*

- Water, Sanitation and Hygiene for Development*, 5(2), 235-243.
- Benga, D., Suhartono, S., & Wahyuningsih, N. E. (2022). Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Program Stbm Diwilayah Kerja Puskesmas Jawakisa Kecamatan Aesesa Selatan Kabupaten Nagekeo Propinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (Undip)*, 10(2), 191-200.
- Bexell, M., & Jönsson, K. (2017, January). Responsibility and the United Nations' sustainable development goals. In *Forum for development studies* (Vol. 44, No. 1, pp. 13-29). Routledge.
- Bicchieri, C., & McNally, P. (2018). Shrieking sirens: Schemata, scripts, and social norms. How change occurs. *Social Philosophy and Policy*, 35(1), 23-53.
- Budi, Adi Asmariadi dan Fauzela, Dian Sera. (2020). "Perancangan Produk Legislasi Berbasis Soft System Methodology," dalam: Prosiding Seminar Nasional Bagian II Pusat Penelitian Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Kebijakan Berbasis Bukti (Evidencebased Policy) untuk Legislasi DPR RI dan Daya Saing Bangsa. Jakarta: Pusat Penelitian Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.
- Cairney, P. (2016). *The Politics of Evidence-Based Policy Making*. Stirling, UK: Palgrave Macmillan.
- Cairney, P., Oliver, K.. (2017). Evidence-based policymaking is not like evidence-based medicine, so how far should you go to bridge the divide between evidence and policy? *Health Res. Pol. Syst.* 15 (1), 35
- Davies, H., Nutley, S., & Smith, P. (2000). *Evidence-based policy and practice in public services*. Bristol, UK: The Policy Press.
- Dryzek, J. S. (2009). Democratization as deliberative capacity building. *Comparative political studies*, 42(11), 1379-1402.
- Elander, A., & Gustafsson, M. (2020). Inhaler technique and self-reported adherence to medications among hospitalised people with asthma and COPD. *Drugs-real world outcomes*, 7, 317-323.
- Febriani, W., Samino, S., & Sari, N. (2016). Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan

- Perilaku Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS): Studi Pada Program STBM Di Desa Sumpersari Metro Selatan 2016. *Jurnal Dunia Kesmas*, 5(3).
- Forsyth, A., & Krizek, K. J. (2010). Promoting walking and bicycling: assessing the evidence to assist planners. *Built environment*, 36(4), 429-446.
- Garn, J. V., Sclar, G. D., Freeman, M. C., Penakalapati, G., Alexander, K. T., Brooks, P., ... & Clasen, T. F. (2017). The impact of sanitation interventions on latrine coverage and latrine use: A systematic review and meta-analysis. *International journal of hygiene and environmental health*, 220(2), 329-340.
- Grindle, M. S. (2017). Politics and policy implementation in the Third World (Vol. 5159). Princeton University Press.
- Harsa, I. M. S. (2019). The Relationship Between Clean Water Sources And The Incidence Of Diarrhea In Kampung Baru Resident At Ngagelrejo Wonokromo Surabaya. *Journal of Agromedicine and Medical Sciences*, 5(3), 124-129.
- Hodgson, D., Fred, M., Bailey, S., Hall, P., et al. (2019). Introduction. In D. Hodgson, et al. (Eds.), *The projectification of the public sector* (pp. 1-8). Abingdon: Routledge.
- Ishatono, I., & Raharjo, S. T. (2016). Sustainable development goals (SDGs) dan pengentasan kemiskinan. *Share: Social Work Journal*, 6(2), 159.
- Kar, K., & Chambers, R. (2008). Handbook on community-led total sanitation (CLTS). *London: Plan International (UK) and Institute of Development Studies, University of Susse*
- Kementerian Kesehatan RI. Kurikulum dan Modul Pelatihan Fasilitator STBM Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Indonesia. 2014.
- Kementerian Kesehatan RI. Monitoring Data STBM [Internet]. Available from: <http://monev.stbm.kemkes.go.id/>
- Kementerian Kesehatan RI. Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). 2011.
- Kementerian Kesehatan RI. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 416/MEN.KES/PER/IX/1990 Tentang Syarat-syarat Dan Pengawasan Kualitas Air. 1990 p. 1-10.

- Kementerian Kesehatan RI. Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2017. 2018.
- Kurniawan, A., Nurjana, M. A., & Widayati, A. N. (2022). Peran Pengelolaan Limbah Rumah Tangga Terhadap Kejadian Diare Pada Balita di Indonesia (Analisis Data Riskesdas 2018). *Media Peneliti dan Pengembangan Kesehatan*, 32(1), 41-50.
- Laswell, H. D. (1956). The Decision Process. Bureau of Governmental Research.
- Maros regency. *International Journal of Recent Scientific Research*, 10(7), 33462–33468
- Marwanto, A., Netrianis and Mualim (2019) "Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Sikap dengan Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Pilar Pertama di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Perawatan Ratu Agung Kelurahan Pematang Gubernur Kota Bengkulu", *Journal of Nursing and Public Health*, 7(1), pp. 1–6.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1980). A multivariate model of public policy-making. *American journal of political science*, 439-468.
- Mbuya, M. N., & Humphrey, J. H. (2016). Preventing environmental enteric dysfunction through improved water, sanitation and hygiene: an opportunity for stunting reduction in developing countries. *Maternal & child nutrition*, 12, 106-120.
- Meilana, H. A., & Wijayanti, Y. (2022). Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Buang Air Besar pada Masyarakat Wilayah Kerja Puskesmas. *Indonesian Journal of Public Health and Nutrition*, 2(3), 319-328.
- Miles Miles, M, A.M. Huberman, and J. Saldana. 2014. *Qualitative data analysis A method sourcebook*. Ed.3. America: Sage publications.
- Moleong, Lexy J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya
- Mukti, D. A., Raharjo, M., & Dewanti, N. A. Y. (2016). Hubungan Antara Penerapan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Dengan Kejadian Diare Di Wilayah Kerja Puskesmas Jatibogor Kabupaten Tegal. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (Undip)*, 4(3), 767-775.
- N"as"anen, J., & Vanharanta, O. (2016). Program group's discursive

- construction of context: A means to legitimize buck-passing. *International Journal of Project Management*, 34(8), 1672–1686.
- Nainggolan, W. R. (2022). Perilaku Buang Air Besar Sembarangan dan Penyakit Kecacingan pada Masyarakat di Daerah Pesisir. *Journal of Social Research*, 1(8), 902-907.
- Notoatmodjo, S. (2014). IPKJRC (2015). Ilmu Perilaku Kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta. *Biomass Chem Eng*, 49(23-6).
- Pawson, R. (2006). Evidence-Based Policy A Realist Perspective. London, UK: SAGE Publications Ltd.
- Petrosino, A., & Boruch, R. (2014). Evidence-based policy in crime and justice. *Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice*. Springer, New York, NY. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-5690-2_665.
- Pickering, A. J., Djebbari, H., Lopez, C., Coulibaly, M., & Alzua, M. L. (2015). Effect of a community-led sanitation intervention on child diarrhoea and child growth in rural Mali: a cluster-randomised controlled trial. *The Lancet Global Health*, 3(11), e701-e711.
- Pudjaningrum, P., Wahyuningsih, N. E., & Darundiati, Y. H. (2016). Pengaruh Metode Pemicuan terhadap Perubahan Perilaku Buang Air Besar Sembarangan pada Masyarakat Kelurahan Kauman Kidul Kota Salatiga. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (Undip)*, 4(5), 100-108.
- Rahmat Pannyiwi Suprpto, Nur Syamsi N.L, A. A. M. (2019). Utilization of family toilet in the Allu village of Minasa Baji Bantimurung districts.
- Ramadanti, Viqra. (2019). Kebijakan Berbasis Bukti (Based Policy Evidence) Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kota Makassar (Studi Kasus Pada Bappeda Kota Makassar). <http://eprints.unm.ac.id/16536/1/jurnal%20viqra.pdf>.
- Ripley, R. B., & Franklin, G. A. (1986). Policy implementation and bureaucracy. Brooks/Cole
- Saliani, H., Pinontoan, O. R., & Posangi, J. (2017). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Praktek Buang Air Besar Masyarakat di Desa Garuga Kecamatan Mantoh Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah. *Paradigma Sehat*, 5(2)..

- Sanderson, Ian. (2002). Evaluation, Policy Learning and Evidence-Based Policy Making. *Public Administration*, 80(1): 1-22. <https://doi.org/10.1111/1467-9299.00292>.
- Schneider, C., Newman, R. A., Sutherland, D. R., Asser, U., & Greaves, M. F. (1982). A one-step purification of membrane proteins using a high efficiency immunomatrix. *Journal of Biological Chemistry*, 257(18), 10766-10769.
- Schrefler, L., 2014. Reflections on the different roles of expertise in regulatory policymaking. In: Ambrus, M., Arts, Hey, K., E, Raulus, H. (Eds.), *The role of "experts" in international and European decision-making processes: Advisors, decision-makers or irrelevant actors?* Cambridge University Press, Cambridge, pp. 63–81.
- Sclar, G. D., Penakalapati, G., Amato, H. K., Garn, J. V., Alexander, K., Freeman, M. C., & Clasen, T. (2016). Assessing the impact of sanitation on indicators of fecal exposure along principal transmission pathways: a systematic review. *International journal of hygiene and environmental health*, 219(8), 709-723.
- Sholikhah, S. 2014. Hubungan Pelaksanaan Program ODF (*Open Defecation Free*) dengan Perubahan Perilaku Masyarakat dalam Buang Air Besar di Luar Jamban di Desa Kemiri Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro Tahun 2012. *Surya*. Vol.02, No.XVIII
- Song, J., Song, L., Liu, H., Feng, Z., & Müller, R. (2022). Rethinking project governance: Incorporating contextual and practice-based views. *International Journal of Project Management*, 40(4), 332–346.
- Strassheim, H., Kettunen, P., 2014. When does evidence-based policy turn into policy based evidence? Configurations, contexts, and mechanisms. *Evid. Policy* 10 (2), 259–277.
- Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suriawiria, U. (1996). *Air dalam kehidupan dan lingkungan yang sehat*. Alumni.
- Sutcliffe, S. (2005). Evidence-Based Policymaking: What is it? How does it work? What relevance for developing countries?.

Talinusa, C. E., Rattu, J. A., & Adam, H. (2017). Determinan Perilaku Buang Air Besar Sembarangan Di Desa Jayakarsa Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara. *KESMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi*, 6(4).

Van Marrewijk, A., & van den Ende, L. (2022). Shaping interorganizational strategic projects through power relations and strategic practices. *International Journal of Project Management*, 40(4), 426–438.